

PERAN HUMAS MPR RI DALAM SOSIALISASI 4 PILAR KEBANGSAAN

Wahyuning Chumaeson¹, Ananda Puguh Damayanto², Joko Larsono³

¹)Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Boyolali

^{2,3})Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Boyolali

Korespondensi : chumaesonwahyuning@gmail.com

ABSTRAK

Empat pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu, Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan alat pemersatu Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penanaman nilai Pilar-Pilar Kebangsaan tersebut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat agar tidak mudah digoyah oleh bangsa asing dan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan bangsa tetap terjaga.

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) MPR RI adalah Biro Humas Pemerintahan yang ruang lingkup tugasnya sangat besar mengingat MPR RI adalah lembaga tinggi negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Biro Humas MPR RI mempunyai peran penting dalam melakukan pemberitaan dan pengolahan data dan informasi, baik dari luar maupun dari dalam lingkungan MPR RI. Jadi, Humas MPR RI sangat vital keberadaannya, tanpa Humas MPR RI, akan sulit melakukan pendekatan kepada publik internal dan eksternal.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Humas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, apa saja kegiatan Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan. Penelitian ini menggunakan Teori Peran Humas Cutlip, Center dan Broom, teori tersebut digunakan sebagai alat pembedah dalam pembahasan peran Humas MPR RI, apakah Humas MPR RI berhasil atas metode yang digunakan untuk menyebarluaskan pemahaman Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara kepada masyarakat luas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, pandangan peneliti, dan sumber data sekunder lainnya dalam pustaka. Hasil penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, diperoleh beberapa temuan, antara lain adalah sebagai penghubung antara MPR RI dengan publiknya, membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya, menjadi pendukung dalam fungsi manajemen MPR RI dan berupaya menciptakan citra bagi MPR RI. Dari penelitian yang kemudian dijabarkan dan dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Humas MPR RI mempunyai peranan yang penting dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa. Pelaksanaannya Sosialisasi bisa berjalan baik dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap permasalahan di masyarakat. Pesan yang disampaikan pada saat sosialisasi berlangsung tersebar luas secara masif. Sedangkan hambatan yang dihadapi Humas MPR RI yaitu hambatan dana, tidak ada hambatan dalam proses penyampaian pesannya.

Kata Kunci : Humas, Sosialisasi, Pilar-Pilar Kebangsaan

PENDAHULUAN

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika, adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan Negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Melalui nilai-nilai Empat Pilar, maka diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Empat Pilar ini akan dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara Negara dan masyarakat konsisten mengamalkannya dalam arti yang seluas-luasnya. Pengertian pilar adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk.

Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain. Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar Negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi Negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.

Sebagai lembaga pemerintahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, bentuknya sebagai Lembaga Bikameral yang merupakan Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah amandemen UUD 1945 anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR RI dan DPD RI, sebagai sebuah Lembaga Pemerintahan sekaligus yang selalu mendukung Presiden demi memelihara keutuhan bangsa, MPR RI memiliki peran penting untuk memasyarakatkan Indonesia terhadap Empat Pilar yang diemban oleh lembaga ini. Empat Pilar tersebut adalah Pancasila, UUD (Undang-undang Dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan MPR RI difasilitasi oleh Sekretariat MPR RI yang merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab kepada Pimpinan MPR RI, Adapun tugas Sekretariat Jendral (Sekjen) MPR RI memberikan dukungan administrative dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR RI. Adapun unit kerja Sekjen MPR RI terdiri atas ; 1) Biro Persidangan dan Sosialisasi, 2) Biro Sekretariat Pimpinan, 3) Biro Hubungan Masyarakat, 4) Biro Administrasi dan Pengawasan, 5) Biro Keuangan, 6) Biro Umum, dan 7) Biro Pengkajian.

Oleh karena MPR RI memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, terutama memasyarakatkan Indonesia akan pentingnya kebhinekaan agar kejadian seperti Papua tidak terulang

lagi. Maka Biro Humas dari MPR RI menjalankan apa yang telah ditugaskan kepada mereka yaitu untuk melakukan kegiatan sosialisasi terkait Kebhinekaan haruslah diperhatikan lembaga pemerintah untuk menciptakan kerukunan persatuan yang kokoh diantara individu satu dengan individu lainnya dari Sabang sampai Merauke. Dengan kata lain Biro Hubungan Masyarakat (Humas) MPR RI memiliki tugas penting dalam membantu Pimpinan MPR RI dalam mensosialisasikan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh masyarakat Indonesia secara merata agar rasa cinta tanah air terus berkobar dalam diri setiap individu. Humas, karena mengingat tugas Humas adalah mampu menjelaskan instansi yang terikat dengannya, seperti MPR RI yang bertugas memasyarakatkan rakyat akan nilai-nilai empat pilar yang diemban MPR itu sendiri.

Sosialisasi juga merupakan bagian dari tugas Hubungan Masyarakat (Humas) dibidang pemerintah, untuk menyampaikan pesan-pesan 4 pilar yang dimana didalamnya terdapat unsur atau Pilar pertama Pancasila, Pilar ke dua adalah Undang Undang Dasar 1945, Pilar ke tiga yaitu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Pilar ke empat Bhineka Tunggal Ika, dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai tersebut menurut D.H. Asegaff yang menyebutkan bahwa Humas merupakan mata, telinga, bahkan sebagai mulut dari instansi, jawatan, atau perusahaan tersebut. (Sunarto, 2011) yang berarti Humas MPR RI harus melaksanakan tugas dai instansi yang dibawahinya untuk mensosialisasikan empat pilar. Disisi yang lain banyak harapan dari masyarakat bahwa sosialisasi yang telah dilakukan memang sudah sangat efektif namun belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga MPR harus terus melakukan sosialisasi dengan jangkauan yang lebih luas yang diharapkan akan banyak masyarakat yang paham terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung tugas dan wewenang tersebut, sehingga Humas Sekretariat Jenderal MPR RI ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Empat Pilar kehidupan bernegara melalui media massa.

KERANGKA TEORITIK

Peran Humas MPR RI

Humas atau sebutan populernya adalah *public relations*, didefinisikan oleh Scott M. Cutlip, Aleen H. Center dan Glen M. Broom (2009), dalam bukunya *Effective Public Relations* bahwa *Public Relations* adalah fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, mengidentifikasikan kebijakan- kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik.

Sedangkan menurut Ruslan (2007) mengatakan bahwa Humas adalah manajemen khas yang mendukung pembinaan dan pembangun upaya saling menguntungkan melalui komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerja sama yang baik antara organisasi dengan publiknya. Dalam praktiknya, *communication is backbone of PR* (komunikasi adalah tulang punggung PR, sementara secara ilmu PR adalah subdisiplin ilmu komunikasi). Setiap kegiatan PR dalam bentuk event (kegiatan- kegiatan), campaigns (kampanye-kampanye), dan programmes (program-program) memerlukan strategi komunikasi yang dipadukan dengan strategi PR. Mengingat tujuan komunikasi adalah untuk mengubah opini, sikap, perilaku dan sosial, sedangkan tujuan PR adalah pembentukan citra (image building) dan pembentukan reputasi, track record atau rekam jejak (*reputating building*). Kaitan

upaya PR membentuk citra positif suatu organisasi atau perusahaan dimata publiknya, menyangkut unsur-unsur sebagai berikut: (Soemirat dan Ardianto Effendy, 2011)

- a. Citra baik (*good image*)
- b. Itikad baik (*good will*)
- c. Saling pengertian (*mutual understanding*)
- d. Saling mempercayai (*mutual confidence*)
- e. Saling menghargai (*mutual appreciations*)
- f. Toleransi (*tolarance*)

Peran Humas atau *public relations* dalam sebuah perusahaan atau organisasi sangat besar. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan ditinjau dari berbagai bidang terutama *public relations*. *Public relations* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah hubungan masyarakat (humas). John P. Simandjuntak (2003) menyatakan: “*Public relations* adalah fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara relasi yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya, dimana publik inilah yang menentukan berhasil atau gagalnya perusahaan.

Humas merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara relasi yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Memelihara dan membangun relasi merupakan hal yang sangat penting. Relasi yang terjalin inilah yang akan menentukan berhasil apa tidaknya tujuan dari perusahaan. Eksistensi suatu organisasi ditentukan oleh bagaimana organisasi tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan berinteraksi dengan publiknya, baik itu internal maupun eksternal. Humas sangat berperan dalam membangun hubungan tersebut, mengingat Humas merupakan jembatan komunikasi antara organisasi dengan publiknya, baik itu internal maupun eksternal.

Apabila Humas atau *public relations* dapat berinteraksi dengan baik maka kepercayaan publik akan meningkat. Seperti pendapatnya Keith Butterick (2012) berpendapat bahwa *public relations* adalah: “Fungsi manajemen unik yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi, memunculkan pemahaman, kerjasama antar organisasi dan publiknya, melibatkan manajemen permasalahan dan isu, membantu manajemen untuk terus menginformasikan dan *tanggap* terhadap opini publik, mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, melayani sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah kecenderungan negatif, dan menggunakan penelitian yang sehat dan etika komunikasi sebagai alat utamanya”.

Fungsi Humas atau *public relations* adalah membantu membangun dan memelihara komunikasi agar kerjasama dengan publiknya berjalan dengan baik. Terpeliharanya komunikasi dengan baik dapat membantu mencegah hal-hal yang dapat menghambat terjalinnya komunikasi dengan publiknya. Komunikasi yang terjalin dengan publik harus senantiasa terjalin agar dapat lebih tanggap dalam menanggapi setiap permasalahan yang muncul. Menurut Rhenald Kasali (2003) *public relations* merupakan: “Suatu fungsi strategi dalam manajemen yang melakukan komunikasi untuk menimbulkan pemahaman dan penerimaan dari publik. Dalam prosas penerimaan publik ini, perusahaan perlu memperhatikan hubungan yang harmonis dengan masyarakatnya, seperti terbuka, jujur, *fair*, konsisten dan tidak mengasingkan diri.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *public relations* adalah

fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara relasi yang baik dengan publiknya. Relasi yang baik dapat terbentuk dengan melakukan komunikasi untuk menimbulkan pemahaman dan penerimaan dari publik. Proses penerimaan publik ini, perusahaan perlu memperhatikan hubungan yang harmonis dengan masyarakatnya, seperti terbuka, jujur, *fair*, konsisten dan tidak mengasingkan diri.

Humas MPR RI mengemil peran sebagai penyambung antara Pimpinan dan Anggota MPR RI dengan publiknya, Peran tidak dapat dipisahkan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peran diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda, akan tetapi kekekatannya sangat terasa sekali. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena dia (orang tersebut) mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukan itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.

Dari penjelasan tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran merupakan seperangkat tindakan, perbuatan, atau pekerjaan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan di mana dia berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, sebuah peran berkaitan dengan fungsi, tugas, dan status seseorang dalam suatu masyarakat.

Sebagai Humas Lembaga pemerintahan keberadaan Humas MPR RI, sama halnya Humas pemerintahan pada umumnya yaitu keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga/instansi pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya (Onong U Effendy 1993), lebih lanjut juga disebutkan bahwa Humas Pemerintahan berfungsi sebagai pengelola informasi dan opini publik yang muncul dari masyarakat karena rakyat dalam pemerintahan ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan yang apabila tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, rakyat akan cepat mengkritiknya. Humas melakukan penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah yang disebarluaskan, sedangkan opini publik dikaji dan diteliti seefektif mungkin untuk keperluan dan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan selanjutnya.

Peranan umum Humas dalam manajemen suatu organisasi itu terlihat dengan adanya beberapa aktivitas pokok kehumasan, yaitu mengevaluasi sikap atau opini publik, artinya Humas harus bisa mengoreksi apa yang kurang dalam pelaksanaan sosialisasi dan membaca situasi dalam setiap menjalankan tugas di masyarakat. Kemudian mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi/ perusahaan dengan kepentingan publiknya. Humas dalam terjun ke masyarakat harus bisa membedakan mana yang benar-benar kebijakan pemerintah, dan mana kepentingan masyarakat yang sedang dihadapi. Karena seringkali kepentingan masyarakat jauh lebih banyak dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal itu sesuai dengan pendapat Cutlip dan Center dalam buku Rusady Ruslan yang menyebutkan bahwa "Peran Humas pada intinya adalah sebagai *Communicator*, penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya. Dari uraian tersebut dijelaskan Humas berperan sebagai perwakilan perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan publik internal dan eksternal".(2008)

Selanjutnya merencanakan dan melaksanakan penggiatan aktivitas Humas.

Sebelum melaksanakan tugasnya, Humas harus memiliki rencana matang. Konten apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat nanti. Jika hal ini sudah dilakukan, maka kemungkinan besar pesan yang ingin disampaikan akan tepat sasaran. Pada umumnya manajemen Humas berperan untuk melakukan beberapa tahapan-tahapan diantaranya Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengkomunikasian (*communicating*), Pengawasan (*controlling*) dan Penilaian (*evaluating*).

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Pengertian sosialisasi dalam arti sempit adalah proses pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bruce J. Cohen, pengertian sosialisasi adalah proses pembelajaran seorang individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga seseorang menjadi bagian dari masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dalam Kamus Sosiologi menyatakan, Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat baru. (1995) Sosialisasi juga diartikan sebagai belajar- mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.

Pendapat Arifin Noor dalam bukunya yang berjudul Ilmu Sosial Dasar (2007), dikatakan bahwa sosialisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang dilakukan seseorang dalam menghayati norma- norma kelompok tempat ia hidup, sehingga menjadi bagian dari kelompoknya. Sedangkan David A. Goslin mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai- nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. (Ihrom, 2004)

Dari pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bagaimana seseorang didalam proses belajar, memahami, menanamkan didalam dirinya untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar individu tersebut dapat diterima serta berperan aktif didalam kelompok masyarakat. Setelah berinteraksi dengan individu lain yang berada disekitarnya atau bersosialisasi dengan lingkungannya barulah individu tadi dapat berkembang. Dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anaknya adalah orang tuanya. Melalui lingkungan itulah anak mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari, melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal.

Lewat proses-proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah pekerti-tingkah pekerti apakah yang harus dilakukan dan tingkah pekerti-tingkah pekerti apa pulakah yang harus tidak dilakukan (terhadap dan sewaktu berhadapan dengan orang lain) di dalam masyarakat. Ringkas kata, lewat sosialisasi warga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, dan kemudian dapat bertingkah pekerti sesuai dengan peranan sosial masing- masing itu. Tepat sebagaimana yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada, dan selanjutnya mereka-mereka akan dapat saling menyasikan serta menyesuaikan tingkah pekerti

masing-masing sewaktu melakukan interaksi-interaksi sosial.

Indonesia memiliki empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar tersebut harus diperkokoh untuk membangun bangsa dalam tatangan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Jika diibaratkan pilar merupakan tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang ini rapuh maka bangunan akan mudah roboh. Empat tiang penyangga ditengah ini disebut soko guru yang kualitasnya terjamin sehingga pilar ini akan memberikan rasa aman tenteram. Dengan demikian pilar pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan tiang penyangga bagi berdirinya negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam paradigma pembangunan di negara Indonesia hakikat kedudukan Pancasila mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik aspek pembangunan politik, pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial. Dalam pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila di Indonesia menganut sistem politik demokratis yakni menempatkan rakyat dalam kedudukan tertinggi yang berarti meletakkan kedaulatan pada seluruh rakyat (demokrasi). Hal ini berlawanan dengan sistem diktator/otoriter/totaliter yang menempatkan sebagian kecil rakyat dalam kedudukan tertinggi (meletakkan kedaulatan pada elite). Sementara ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Sistem ini menentang adanya *free fight liberalism*, *Etatisme* dan monopoli (Ferdiansyah dan Irton, 2011).

UUD 1945 merupakan pilar kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD 45 tertuang Tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpahdarah Indonesia” hal ini merupakan tujuan Negara Rumusan “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” hal ini merupakan tujuan Negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah “ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan aturan-aturan yang kemudian diatur dalam pasal-pasal, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semestinya mentaati aturan yang sudah diundang-undangkan.

NKRI sebagai pilar ketiga lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Sebab itu, NKRI adalah prinsip pokok, hukum, dan harga mati. NKRI hanya dapat dipertahankan apabila pemerintahan adil, tegas, dan berwibawa. Dengan pemerintahan yang adil, tegas, dan berwibawalah masalah dan konflik di Indonesia dapat diselesaikan. NKRI adalah hal pokok yang harus kita pertahankan.

Pilar keempat dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah motto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu” yang berarti walaupun bangsa Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari suku, agama, dan bangsa tetapi adalah bangsa Indonesia (Ferdiansyah dan Irton, 2011).

Keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara semestinya harus dijaga, dipahami, dihayati dan dilaksanakan dalam pranata kehidupan sehari-hari, dimana Pancasila yang menjadi sumber nilai menjadi idealogi, UUD 45 sebagai aturan yang semestinya ditaati, dan NKRI adalah harga mati, serta Bhinike tunggal ika adalah perekat semua rakyat. Maka dalam bingkai 4 pilar tersebut maka tujuan yang dicita-citakan bangsa ini akan terwujud.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertumpu pada pemahaman mengenai berbagai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang kompleks dan juga rinci. Defenisi Bodyan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis yang jelas tentang inkuiri yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sebuah gambar kompleks menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan informan secara detail, dan melakukan studi dalam latar ilmiah. (Rulam Ahmadi, 2016)

DISKUSI

Peran Humas MRR RI

Visi MPR adalah “MPR Menjadi Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila Dan Kedaulatan Rakyat”. Makna dari visi MPR dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. MPR menjadi rumah kebangsaan memiliki makna bahwa MPR adalah representasi Majelis Kebangsaan yang menjalankan manan konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah dengan mengedepankan etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai-nilai permusyawaratan/ perwakilan, kekeluargaan, toleransi, kebhinekaan dan gototng-royong dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila memiliki makna bahwa MPR sebagai satu-satunya lembaga Negara pembentuk konstitusi (*the making of the constitution*), adalah pengawal ideologi negara (*the guardian of the state ideologi*) Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara.
- c. MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa MPR adalah lembaga Negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan kenegaraan

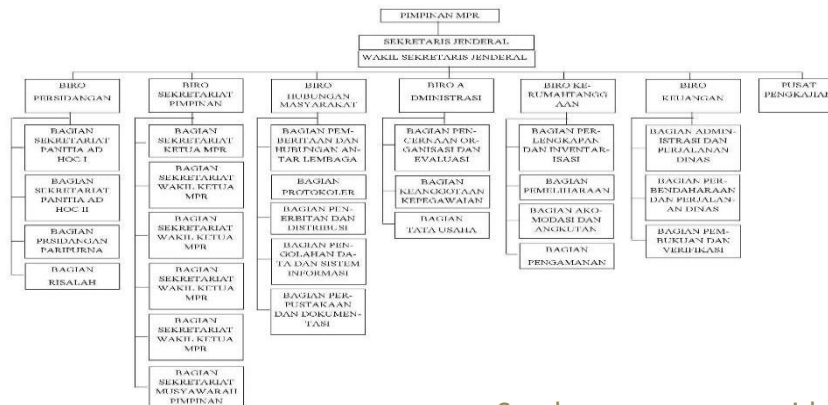
dan kemasyarakatan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan politik dan ketatanegaraan yang berlandaskan pada Pancasila.

Misi Majelis Permusyawaratan Rakyat:

Dalam rangka mewujudkan visi “MPR Menjadi Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, Dan Kedaulatan Rakyat”, maka misi dari MPR adalah:

- a. Melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, dengan berlandaskan asas legalitas, asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong-royong.
 - b. Melaksanakan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika serta ketetapan MPRS/MPR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - c. Mengawal penataan sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya.
 - d. Memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 dalam setiap kebijakan Nasional.
 - e. Memperkukuh prinsip permusyawaratan, kerukunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhineka Tunggal Ika.
 - f. Menegakkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan keamanan.
 - g. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat.
 - h. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara lembaga Negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan prinsip *checks and balances*.
 - i. Memperkuat harmonisasi dalam hubungan diplomatik antar parlemen dan antar Negara sahabat dalam rangka mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta fungsi diplomasi parlemen.
- (sumber: www.mpr.go.id)

Sekretariat Jendral Majelis, yaitu aparat pemerintah yang terbentuk kesekretariatan Lembaga Negara. Susunan dalam Sekretariat Jendral Majelis dipimpin oleh sekretariat jendral serta wakil sekretariat yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada MPR. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Jendral MPR RI:



Sumber: www.mpr.go.id

Menurut Litbang Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Hubungan Antar Lembaga, menyebutkan bahwa Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal MPR RI ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Empat Pilar kehidupan bernegara melalui media massa. Oleh karena itu, dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan kehumasan, Biro Hubungan Masyarakat dituntut untuk mampu memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian guna terselenggaranya kegiatan sosialisasi melalui media massa tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung sosialisasi Empat Pilar utama kehidupan bernegara agar terlaksana secara masif dan menyentuh kalangan masyarakat luas.

Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komersial walaupun Humas Pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, yaitu promosi dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada pelayanan umum. Dalam kerangka sosialisasi, untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan politik, diselenggarakan juga Pelatihan untuk Pelatih Sosialisasi Putusan MPR atau yang disebut dengan *Training of Trainers* di tingkat provinsi dan beberapa kementerian, Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan seminar-seminar yang berkaitan dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR.

Seminar ini dilakukan untuk menghimpun dan mengetahui berbagai pandangan dan pendapat masyarakat mengenai hal-hal terkait dengan penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Seluruh anggota MPR diwajibkan melakukan sosialisasi Empat Pilar di Dapil nya masing-masing, karena MPR terdiri dari anggota DPR (575 orang) dan DPD (136 orang) total 711 orang dan semuanya harus aktif dalam mensosialisasikan Empat Pilar. Pimpinan dan anggota MPR RI yang dibantu Biro Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar kebangsaan juga memanfaatkan media elektronik sebagai media sosialisasi. Dialog media elektronik yaitu radio (RRI) dan televisi (TVRI).

Biro Hubungan Masyarakat (Humas MPR RI) mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi publik, penyusunan kegiatan hubungan antarlembaga, pengembangan sarana jaringan, pengolahan data internal dan eksternal, penyajian informasi MPR RI dan pelayanan perpustakaan serta tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Dalam menjalankan tugasnya Biro Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut: 1) Penyebarluasan informasi dan pelayanan informasi publik, penyusunan kegiatan hubungan antarlembaga dan delegasi masyarakat, pelayanan informasi kepada masyarakat tentang fungsi, tugas dan kedudukan lembaga MPR; 2) Perencanaan kebutuhan pengembangan dan sarana jaringan, pengolahan data internal dan eksternal, menyajikan informasi secara elektronik terkait MPR dan Sekretariat Jenderal MPR; 3) Pendokumentasian media visual kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR; 4) Perencanaan dan pemeliharaan bahan pustaka serta pelayanan perpustakaan; dan 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Hubungan Masyarakat didukung oleh unit kerja setingkat Eselon III. Unit kerja Biro Sekretariat Pimpinan terdiri atas: 1) Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi; 2) Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi; 3) Bagian Media Visual; dan 4) Bagian Perpustakaan.

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Sosialisasi empat pilar kebangsaan Indonesia (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika) merupakan upaya agar rakyat Indonesia memahami nilai-nilai dan jati diri bangsa sehingga dapat memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan dengan metode dan memanfaatkan berbagai media. Salah satu metode yang digunakan adalah metode berbasis workshop, seminar. Sasaran peserta sosialisasi cukup luas, meliputi penyelenggara negara hingga pelajar. Pemilihan pelajar sebagai peserta sosialisasi dirasa cukup mendasar, karena pelajar sebagai calon pemimpin bangsa hendaknya perlu memahami dasar-dasar negara Republik Indonesia.

Dalam kerangka sosialisasi, untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan politik, diselenggarakan juga Pelatihan untuk Pelatih Sosialisasi Putusan MPR atau yang disebut dengan *Training of Trainers* di tingkat provinsi dan beberapa kementerian, Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan seminar-seminar yang berkaitan dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Seminar ini dilakukan untuk menghimpun dan mengetahui berbagai pandangan dan pendapat masyarakat mengenai hal-hal terkait dengan penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Penggunaan media dalam sosialisasi dengan memanfaatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online. Bentuk sosialisasi melalui televisi dilakukan Setjen MPR RI melalui dialog interaktif antar anggota majelis dengan masyarakat di stasiun televisi negeri maupun stasiun televisi swasta. Selama penyelenggaraan sosialisasi melalui televisi, terdapat kendala dalam menggelar acara dialog yaitu volume kegiatan anggota MPR dan alat kelengkapannya yang sangat padat oleh kegiatan sosialisasi lainnya di MPR serta kegiatan-kegiatan di DPR dan DPD. Bentuk sosialisasi lain yaitu media cetak dalam bentuk peliputan kegiatan MPR yang akan dipublikasikan dengan format pemberitaan di koran maupun majalah.

Sosialisasi selanjutnya dilakukan Setjen MPR RI menggunakan radio dengan melalui dialog interaktif antara anggota majelis dengan pendengar Radio Republik Indonesia (RRI). Pemilihan RRI untuk melakukan sosialisasi dikarenakan jangkauan penyebaran berita RRI yang luas dengan jumlah pendengar sebesar 4.395.280 orang yang tersebar di 11 kota besar (Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Makassar dan Manado). Target kinerja yang ditetapkan terhadap pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan adalah 80% sedangkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan realisasi sebesar 94,21%. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, maka didapatkan capaian kinerja sebesar 117,50%. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terlihat adanya tren kenaikan capaian.

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa ujuan dari sosialisasi Empat Pilar Bangsa di atas tidak lain adalah menjadikan masyarakat Indonesia yang majemuk ini agar terus bersatu padu, tidak berpecah belah antar suku. Sosialisasi Empat Pilar Bangsa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Humas MPR RI dalam menyebarkan informasi-informasi dan kebijakan pemerintah demi meratanya pengetahuan masyarakat Indonesia akan pemahaman konstitusional negara kita.

Dengan memadukan beberapa aktivitas yang menjadi agenda Pimpinan, Anggota dan Humas MPR berharap mencapai satu hasil yang berlipat. Sehingga MPR bisa benar-benar dekat di masyarakat dan bisa mengurangi citra negatif yang selalu akrab dengan lembaga pemerintah di mata masyarakat. Tentunya tugas-tugas Pimpinan, Anggota dan Humas MPR RI ini juga membutuhkan dukungan kita, jika kita acuh akan tujuan-tujuan sosialisasi MPR ini maka kegiatan mereka juga akan sia-sia. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran yang serius dari setiap elemen masyarakat.

Sesuai dengan Teori Peran Humas oleh Cutlip dan Center yaitu sebagai *Communicator*, membina *Relationship*, melakukan peranan *Back Up Management* dan membentuk *Corporate Image*, dimana Humas MPR RI melaksanakan aktifitas sosialisasi Empat Pilar Bangsa yang sekaligus melakukan fungsi-fungsi MPR RI. Sesuai dengan teori peran Humas tersebut dan hasil penelitian di lapangan, penulis mendapatkan data-data dan fakta terkait peran dan kegiatan Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa.

Pertama, Peranan Humas sebagai *Communicator*. Pimpinan dan anggota tim kerja sosialisasi MPR RI yang secara tidak langsung adalah Humas MPR RI, mereka berperan sebagai *Communicator*. Dalam hal ini, mereka sama-sama berperan sebagai penghubung untuk mewakili MPR RI dalam melakukan komunikasi dengan publik internal dan eksternal.

Kedua, Peranan Humas MPR RI dalam membina *Relationship* ditunjukkan dengan mengadakan Lomba Cerdas Cermat UUD NRI 1945 tingkat SLTA di seluruh Indonesia yang membina kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, SLTA-SLTA di seluruh Indonesia dan PGRI. Lomba ini bertujuan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya penyelenggaraan kehidupan berkonstitusi melalui pemahaman aturan dasar bernegara, khususnya di kalangan generasi muda, membangun dan membina persahabatan antargenerasi muda yang dapat memperkuat persatuan bangsa dan memahami pentingnya kebhinekaan dalam program budaya dan hidup berbangsa di kalangan siswa SLTA.

Humas MPR RI sebagai membina *Relationship* selanjutnya adalah Dialog Interaktif RRI. Sosialisasi ini bentuknya adalah dialog tanya jawab dengan media elektronik radio antara penyiar dan narasumber dari MPR RI dan juga melibatkan penelepon dari seluruh Indonesia. Setiap siaran, acara Dialog Interaktif RRI juga menetapkan tema yang khusus, namun garis besarnya tetap Empat Pilar Bangsa.

Kemudian ada kegiatan sosialisasi Seminar Nasional Empat Pilar. Seminar ini dilakukan untuk menghimpun dan mengetahui berbagai pandangan dan pendapat masyarakat mengenai hal-hal terkait dengan penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. MPR RI dan Fraksi-Fraksi Partai menggelar Seminar Nasional Empat Pilar Kebangsaan di berbagai kota di Indonesia. Acara yang dihadiri sekitar 300 peserta guru-guru sekolah menengah pertama, sekolah dasar, dan madrasah ini mengambil tema yang khusus terkait dengan peristiwa yang terjadi di sekitar masyarakat, dengan tetap bersandar pada nilai-nilai Empat Pilar Bangsa. Acara ini dihadiri oleh tim kerja sosialisasi MPR dan ketua atau anggota fraksi partai sebagai narasumber, dan tokoh terkait di provinsi setempat.

Ketiga, Peranan Humas MPR RI dalam Peranan *Back Up Management* diantaranya adalah Dialog diskusi kemajlisian dengan pesertanya wartawan yang disebut dengan Forum Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat). Forum ini adalah forum antara Humas di instansi-instansi lain dengan Humas MPR RI. Dari pemerintah misalnya, Humas MPR menjalin hubungan dengan semua Kementerian

dan lembaga-lembaga yang lain seperti PGRI, Kementerian- kementerian. Contoh peran Humas dalam Peranan *Back Up Management* adalah Biro Humas menerima kunjungan dari sekolah-sekolah baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SLTA maupun perguruan tinggi yang ingin berkunjung ke MPR RI diberikan dan sisipkan pembelajaran dan sosialisasi mengenai apa itu MPR dan mengenai Empat Pilar itu sendiri.

Selain itu Peran Humas MPR RI dalam membentuk *Corporate Image* memiliki tugas utama yaitu membentuk citra positif. Terkait dengan pembentukan citra positif tersebut, Bagian Pemberitaan memiliki peran yang sangat penting karena Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberitaan dan penerbitan. Karena itu seiring dengan upaya pembentukan citra positif tentang MPR RI, diharapkan Bagian Pemberitaan lebih meningkatkan sosialisasi kegiatan dan hasil-hasil kerja MPR RI melalui pemberitaan di media massa maupun media internal yaitu bulletin dan majalah Parlementaria serta *home page* MPR RI di www.mpr.go.id.

KESIMPULAN

Peran Humas MPR secara umum, seperti menjadi *Communicator*, membina *Relationship* , peranan *Back Up Management* dan membentuk *Corporate Image* berjalan cukup baik. Mendukung secara teknis dan administratif tugas-tugas dari Pimpinan MPR. Ini bisa kita lihat pada kegiatan- kegiatan sosialisasi MPR RI dimana Pimpinan MPR RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI yang telah dibentuk. Karena juru bicara dari MPR sebenarnya adalah Pimpinan MPR sendiri.

Kegiatan Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa ini disusun sebagai kerangka dalam menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa. Sehingga cita-cita dan tujuan dari sosialisasi Empat Pilar Bangsa bisa terwujud. Segala persiapan yang matang dilakukan oleh Humas MPR RI demi terciptanya hubungan yang baik antara instansi pemerintah dengan masyarakat Indonesia dengan menampung aspirasi publiknya. Dengan memberikan pelayanan dan menyebarkan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro. *Teori dan Metodologi Penelitian "Public Relations"*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- Bertrand R. Canfield. 1959. *Public Relations, Principles and Problems*, dikutip oleh Roland E. Wolseley & Laurence R. Campbell, Third Edition, Exploring Journalism, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Human Relations dan Public Relations*. Bandung: CV Mandar Maju.
- , 1999. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jefkins, Frank – Daniel Yadin. 2003. *Public Relations*. Jakarta: Erlangga.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lingar Anggoro, M. 2005. *Teori dan Profesi KeHumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Litbang Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Hubungan Antar Lembaga.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2019-2024. 2020. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.